

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DALAM MENILAI KINERJA  
KEUANGAN PADA KABUPATEN  
LABUHANBATU UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh :**

**Nama** : Ikram Ihza Hawari  
**NPM** : 1905170375P  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Konsentrasi** : Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada Hari Jumat, Tanggal 01 Maret 2024, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : IKRAM IHZA HAWARI  
N P M : 1905170375P  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Skripsi : ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KABUPATEN  
LABUHANBATU UTARA

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Penguji II

(Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA)

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)



Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mochtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA : IKRAM IHZA HAWARI  
NPM : 1905170375P  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DALAM MENILAI KINERJA  
KEUANGAN PADA KABUPATEN LABUHANBATU  
UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan  
Skripsi

Medan, Januari 2024

Pembimbing Skripsi

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si



Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : IKRAM IHZA HAWARI  
 N.P.M : 1905170375P  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
 Nama Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA  
 Judul Penelitian : ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 PENDAPATAN DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN  
 PADA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	—		
Bab II	Teri yang akan dilihat lagi	30/9 23	3/
Bab III	spasi perbaiki lagi	30/9 23	2/
Bab IV	deskripsi data lebih di perincikan pembahasan di jelaskan lagi	30/9 23	2/
Bab V	perbaiki kesimpulan	30/9 23	2/
Daftar Pustaka	ditulis dosen sbt	30/9 23	3/
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

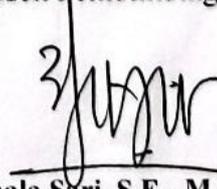
Medan, September 2023

Diketahui oleh :  
Ketua Program Studi



(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum S.E., M.Si.)

Disetujui Oleh :  
Dosen Pembimbing



(Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA)

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

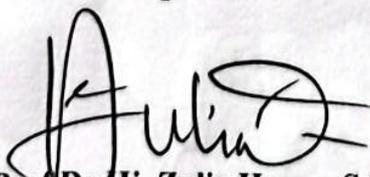
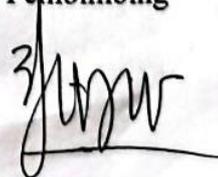
Nama Lengkap : IKRAM IHZA HAWARI  
 N.P.M : 1905170375P  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
 Nama Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA  
 Judul Penelitian : ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 PENDAPATAN DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN  
 PADA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	—		
Bab II	—		
Bab III	—		
Bab IV	perbaiki spasi, perbaiki judul & susun daftar - pembalasan perbaiki lagi.	26/10 <sup>23</sup>	
Bab V	perbaiki bab 5 salah penyebut No. 4 yg kelua pgs. bagian lain harus ya meruan	26/10 <sup>23</sup>	
Daftar Pustaka	—		
Persetujuan Sidang Meja Hijau			

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Medan, 2023

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

Disetujui Oleh :  
Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum S.E., M.Si.)

(Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA)

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

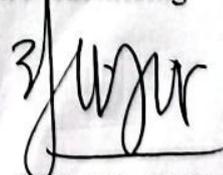
Nama Lengkap : IKRAM IHZA HAWARI  
 N.P.M : 1905170375P  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
 Nama Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA  
 Judul Penelitian : ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 PENDAPATAN DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN  
 PADA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	—		
Bab II	—		
Bab III	—		
Bab IV	Spesifikasi perbaiki, perbaiki data yang ada. Pembahasan lebih diteliti.	5/12 <sup>23</sup>	3/f
Bab V	Saran diperbaiki.	5/12 <sup>23</sup>	3/f
Daftar Pustaka	Mendelany jurnal	5/12 <sup>23</sup>	2/f
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

Medan, Januari 2024

Diketahui oleh :  
Ketua Program Studi

Disetujui Oleh :  
Dosen Pembimbing



(Assoc.Prof.Dr.Hj. Zulia Hanum S.E., M.Si.)

(Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA)

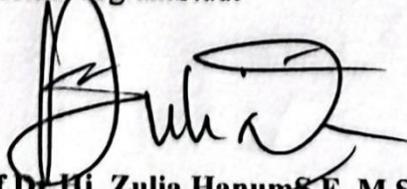
**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

NamaLengkap : IKRAM IHZA HAWARI  
 N.P.M : 1905170375P  
 ProgramStudi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
 NamaDosenPembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA  
 Judul Penelitian : ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 PENDAPATAN DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN  
 PADA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	-		
Bab II	Bab diperbaiki label dgn keproy.	15/12 23	3/
Bab III	-	-	3/
Bab IV	Pembahasan ditambah dgn hasil wawancara.	15/12 23	3/
Bab V	Kesimpulan no 2 diperbaiki	15/12 23	3/
Daftar Pustaka	mendeley sitasi dosen dan UMSU	15/12 23	3/
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc laporan Skripsi lanjut ke sidang	12/1 24	3/

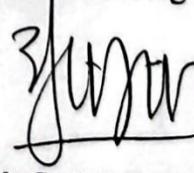
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Medan, 2023

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi



(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum S.E., M.Si.)

Disetujui Oleh :  
Dosen Pembimbing



(Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IKRAM IHZA HAWARI  
N PM : 1905170375P  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kabupaten Labuhanbatu Utara.” Adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

**Yang Menyatakan**



**IKRAM IHZA HAWARI**

## **ABSTRAK**

### **Ikram Ihza Hawari (1905170375P) Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kabupaten Labuhanbatu Utara. Skripsi 2024**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis laporan realisasi anggaran pendapatan dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran pendapatan tidak mencapai target pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data Kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran Kantor Pemkab Labuhan Batu Utara Tahun 2017-2021 dan data primer berupa hasil wawancara dengan pegawai kantor Pemkab Labuhan Batu Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2017, 2019, dan 2020 tidak mencapai anggaran yang telah ditetapkan. Kinerja Keuangan dilihat dari Analisis Efektivitas PAD memiliki kinerja yang menurun. Kinerja Keuangan dilihat dari Analisis Pertumbuhan mengalami fluktuasi dan dimana pertumbuhannya bernilai negatif dan positif yang artinya daerah belum mampu mempertahankan pertumbuhan daerahnya. Kinerja Keuangan dilihat dari Analisis Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan mengalami pola hubungan instruktif.

**Kata Kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Kinerja Keuangan.**

## **ABSTRACT**

**Ikram Ihza Hawari (1905170375P) Analysis of Revenue Budget Realization Reports in Assessing Financial Performance in North Labuhanbatu Regency. Thesis 2024**

The purpose of this research is to find out and analyze the revenue budget realization report in assessing the financial performance of the North Labuhan Batu Regency Government and to find out and analyze the factors that influence the revenue budget realization not reaching the target for the North Labuhanbatu Regency Government. The research carried out was descriptive research. In this research, the type of data used is Quantitative Data. The data sources used are secondary data in the form of reports on the budget realization of the North Labuhan Batu Regency Government Office for 2017-2021 and primary data in the form of interviews with employees of the North Labuhan Batu Regency Government office. The data collection techniques used are documentation and interview techniques. The data analysis technique used in this research is quantitative descriptive analysis. Based on the research results, it shows that the realization of income in the North Labuhanbatu Regency Revenue Budget Realization Report in 2017, 2019 and 2020 did not reach the predetermined budget. Financial Performance as seen from the PAD Effectiveness Analysis has a declining performance. Financial Performance as seen from the Growth Analysis experiences fluctuations and where the growth is negative and positive, which means that the region has not been able to maintain its regional growth. Financial performance seen from the Regional Financial Independence Analysis shows that there is an instructive relationship pattern.

**Keywords: Budget Realization Report, Financial Performance**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya untuk memampukan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kabupaten Labuhanbatu Utara**” guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaiannya skripsi ini, mahasiswa mendapatkan banyak dukungan secara mental dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk yang teristimewa untuk lelaki kekasih hatiku Ayahanda Syawaluddin, S.E., dan yang tersayang Ibunda Siti Mutmainnah, S.Pd., Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, motivasi dan do'a yang diberikan selama ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen Pembimbing penulis yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan proposal ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Medan, Juli 2023.

Hormat Penulis,

**Ikram Ihza Hawari**

**1905170375P**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Batasan Masalah .....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan Penelitian .....	7
1.6 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori .....	9
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Kerangka Berfikir.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	33
3.2 Definisi Operasional Variabel .....	33
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	36
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.6 Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	40
4.2 Pembahasan .....	54
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
5.1 Kesimpulan .....	75
5.2 Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Pendapatan Pada Laporan Realisasi Anggaran .....	3
Tabel 2.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	17
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	36
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara .....	38
Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu.....	41
Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu .....	42
Tabel 4.3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu .....	43
Tabel 4.4 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu .....	44
Tabel 4.5 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu .....	45
Tabel 4.6 Analisis Efektivitas PAD Anggaran dan Realisasi Kabupaten .....	48
Tabel 4.7 Analisis Pertumbuhan Keuangan Daerah Tahun 2017-2021 .....	50
Tabel 4.8 Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2017-2021 .....	53

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....	32
Gambar 4.1 Grafik Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemkab.....	46
Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Analisis Efektivitas PAD Kabupaten.....	49
Gambar 4.3 Grafik Perkembangan Analisis Pertumbuhan Tahun 2017-2021.....	51
Gambar 4.4 Grafik Perkembangan Analisis Kemandirian Kabupaten .....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sejak dikeluarkannya peraturan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kekuasaan atau tanggungjawab yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara maksimal menjadi lebih besar. Hal ini ditujukan supaya distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat merata dan terciptanya keseimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi (Abdullah et al., 2006). Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu (Mardiasmo, 2002). Dengan anggaran manajemen dapat menentukan efektivitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil akrual (realisasi terkini) yang dicapai (Radita, 2017). Penyusunan anggaran dalam pembiayaan di suatu instansi pemerintah merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan instansi tersebut dalam mencapai hasil yang maksimal. (E. N. Sari & dkk, 2016) Penyusunan anggaran yang baik sebagai sistem perencanaan koordinasi dan pengendalian dalam instansi tersebut (Alfi, 2018). Oleh karena itu suatu instansi pemerintah dituntut mempunyai pimpinan yang dapat bekerja dengan efektif dan

efisien, maka perlu adanya alat bantu untuk melaksanakannya, salah satu alat tersebut adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (Niaman, 2017).

Menurut (Mardiasmo, 2009:63) anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberikan informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien tanpa ada korupsi dan pemborosan (Mahsun, 2006).

Untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat langsung dinyatakan dalam bentuk baik atau tidaknya, karena penilaian kinerja yang ada pada pemerintahan tidaklah sama dengan penilaian kinerja pada perusahaan-perusahaan yang memperoleh laba dalam pelaksanaan teknisnya (Widyaningsih, 2006).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD yang disampaikan oleh TAPD menurut (Peraturan Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007, 2011) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara garis besar meliputi Penyusunan KUA-PPAS; Penyusunan Raperda APBD dan Penetapan APBD dalam tahap penyusunan Raperda APBD disusun RKA-SKPD yang didalamnya termuat Penyusunan Rincian Anggaran Pendapatan dalam RKA SKPD

1. Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dalam RKA SKPD
- 2.1. Penyusunan Rincian Anggaran Belanja Langsung (Program & Kegiatan) dalam RKA SKPD
- 2.2.1, Penyusunan Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam RKA SKPD
- 3.2. Rencana Kerja Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang termuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing

program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, di rinci sampai dengan obyek pendapatan, belanja pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

Anggaran digunakan sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan agar setiap aktivitas dapat terarah dan terkontrol dengan baik (Junita & dkk, 2016).

Hasil kinerja seseorang dapat dinilai berdasarkan pencapaian atas realisasi anggaran. Keadaan ini bias mengakibatkan pelaksanaan belanja akan mengalami hambatan. Unit-unit kerja pemerintah diharapkan dapat menghasilkan sejumlah biaya unit yang spesifik untuk unit kerja nya.

**Tabel 1.1**  
**Data Pendapatan Pada Laporan Realisasi Anggaran**  
**Pemkab Labuhanbatu Utara**  
**Tahun 2017-2021**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	2017	1.086.866.263.570	1.050.277.014.266	-36.589.249.304
2	2018	837.030.764.177	1.033.343.832.203	196.313.068.026
3	2019	1.100.453.668.210	1.082.495.846.011	-17.957.822.199
4	2020	974.702.200.952	968.329.052.089	-6.373.148.863
5	2021	1.007.153.937.249	1.038.904.587.062	31.750.649.813

**Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemkab Labuhanbatu Utara**

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa perencanaan atas anggaran pada tahun 2017 s/d 2021 telah disetujui, pada tahun 2017, 2019 dan 2020 realisasi anggaran tidak mencapai anggaran yang direncanakan dan pada tahun 2020 realisasi anggaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada realisasi dan anggaran pendapatan tahun 2018 dan tahun 2020 mengalami penurunan.

Keterkaitan antara anggaran dan realisasi memberikan gambaran bagaimana sebuah instansi dapat dikatakan efektif atau tidak efektif dalam pengambilan

keputusan penganggaran dan pembiayaan tata laksana kegiatan instansi selama satu tahun anggaran tersebut (Juliandi & dkk, 2015). Dengan alat ukur berupa analisis yang ada didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa kinerja anggaran pendapatan (F, 2021). Untuk mengetahui secara besarnya varians anggaran pendapatan dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentasenya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pendapatan yang disajikan terlihat sejauh mana keefektifan dan penerapan anggaran untuk aktivitas instansi selama satu tahun anggaran tersebut.

Pengukuran kinerja anggaran ini dapat menggunakan Analisis Rasio Keuangan Daerah yaitu Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah untuk mengetahui seberapa besar anggaran dan realisasi terwujud dalam suatu instansi dapat dilihat melalui seberapa jauh pemenuhan pada anggaran kegiatan yang digunakan oleh instansi (Halim, 2013). Misalnya dengan melihat pertumbuhan pada masing-masing anggaran, apakah pertumbuhan tersebut rasional atau efektif dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik atau tidak. Pengukuran kinerjanya dapat menggunakan analisis pertumbuhan anggaran pendapatan seperti Analisis Rasio Keuangan Daerah.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, (Dwiyuliati. M, 2012) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2007-2011 secara total berada pada kategori sangat baik, akan tetapi jika dilihat dari rata-rata: ekonomi berada pada kriteria sangat ekonomis, efisiensi berada pada kriteria cukup efisien, dan efektivitas berada pada kriteria sangat efektif.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, keefektifan, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik (Alpi, M. F, dan Ramadhan, 2018)

Penelitian serupa dilakukan oleh Lyesmayyatty (2004) yang menyimpulkan bahwa penyusunan anggaran belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah masih menggunakan pendekatan anggaran tradisional yang dalam proses penyusunannya terdapat beberapa kelemahan dalam aspek perencanaan, sumber daya manusia dan kurangnya komunikasi antar lembaga.

Hasil penelitian Firdayanti (2020) kinerja laporan realisasi anggaran kantor kecamatan baroko dari tahun 2015-2019 dapat di lihat dari rasio efektivitas dikategorikan tidak efektif hal ini disebabkan karena rata-rata rasio efektivitasnya kurang dari 100%, rasio efesiensi belanja menunjukkan kurang efisien disebabkan karena rata-rata efesiennya kurang dari 60%, analisis keserasian belanja menunjukkan belanja operasi dinilai sangat serasi disebabkan karena lebih dari 80%, belanja modal dinilai tidak serasi disebabkan karena kurang dari 20% dan analisis varian belanja daerah dikategorikan baik.

Hasil penelitian Jannah (2015) Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan PAD di Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009-2013 sangat efektif, namun tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja secara keseluruhan kurang efisien dikarenakan penggunaan anggaran

belanja yang terlalu tinggi. Diharapkan pimpinan Dinas Pendapatan Kota Bitung lebih mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk memperbaiki pengelolaan dalam penggunaan anggaran belanja agar lebih ditingkatkan efisiensinya disebabkan karena realisasi belanja di bawah jumlah yang di anggarkan.

Hasil penelitian Kifli (2022) analisis rasio efektivitas UMRI dikategorikan sangat efektif, secara terpisah kemampuan UMRI untuk merealisasikan anggaran pendapatan yang berasal dari biaya pendidikan sudah semakin baik dengan rata-rata persentase senilai 104,5%. Berdasarkan analisis rasio efisiensi UMRI dikategorikan cukup efisien dengan rata-rata persentase senilai 91%, secara umum kemampuan UMRI untuk mengelola belanja mereka agar tidak melebihi pendapatan yang diperoleh cukup membaik dari tahun ke tahun

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kabupaten Labuhanbatu Utara.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah berdasarkan pada latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran dari tahun 2017, 2019 dan 2020 tidak mencapai anggaran yang direncanakan.
2. Anggaran Pendapatan pada tahun 2020 yang direalisasikan mengalami penurunan.
3. Realisasi dan Anggaran Pendapatan tahun 2018 dan 2020 mengalami penurunan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis hanya menekankan pada permasalahan mengenai penilaian kinerja keuangan pada Kantor Pemkab Labuhanbatu Utara selama kurun waktu 5 tahun yang dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yaitu Anggaran dan Realisasi Pendapatan tahun 2017-2021 dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan Daerah yaitu Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian.

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah laporan realisasi anggaran pendapatan dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara?
2. Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran pendapatan tidak mencapai target pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui dan menganalisis laporan realisasi anggaran pendapatan dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- b. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran pendapatan tidak mencapai target pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Penulis**

Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis khususnya mengenai Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kabupaten Labuhanbatu Utara.

**b. Bagi Kantor Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara**

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan tambahan referensi dalam menganalisis kinerja anggaran pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

**c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi penulis selanjutnya, terkhususnya mengenai Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kinerja Keuangan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan dalam konteks dunia usaha mengandung pengertian yang sangat luas. Pengertian kinerja keuangan menurut (Rahmayati, 2007) adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas (Jumingan, 2006).

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Irham Fahmi, 2012:2).

Menurut (Rudianto, 2013) kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana

tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.

Menurut (Mulyadi, 2007:2) menguraikan pengertian kinerja keuangan ialah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.

Pendapat serupa dikemukakan oleh (Sawir, 2005:1) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan.

Menurut (Sujarweni, 2017:71) menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan, hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Setiap pekerjaan yang telah selesai dilakukan perlu penilaian/pengukuran secara periodik.

Dari sejumlah pengertian kinerja keuangan diatas, dapat diambil kesimpulan sederhana bahwa kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.

#### **2.1.1.2 Penilaian Kinerja Keuangan**

Menurut (Srimindarti, 2006:3) penilaian kinerja keuangan yaitu penentuan efektivitas operasional, organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.

Pengukuran kinerja diaplikasikan perusahaan untuk melaksanakan perbaikan atas kegiatan operasional nya agar bisa bersaing dengan perusahaan lain.

Untuk investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor melihat perusahaan tersebut untuk menanamkan modal nya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi dari nilai perusahaan.

Sedangkan bagi perusahaan, informasi kinerja keuangan perusahaan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
3. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
4. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

### **2.1.1.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan**

Tujuan pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk diketahui karena pengukuran yang dilakukan dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan tergantung pada sudut pandang yang diambil dan tujuan analisis. Karena alasan itu, pihak manajemen perusahaan sangat perlu menyesuaikan kondisi perusahaan dengan alat

ukur penilaian kinerja yang akan digunakan serta tujuan pengukuran kinerja keuangan tersebut.

Ada empat tujuan dilaksanakannya pengukuran kinerja keuangan perusahaan (Munawir, 2004) yakni untuk :

1. Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, kewajiban keuangan yang dimaksud mencakup keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif.
4. Mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil.

Kemampuan yang dimaksud diukur dari kemampuan perusahaan membayar pokok hutang dan beban bunga tepat pada waktunya. Dengan tujuan tersebut, penilaian kinerja keuangan mempunyai beberapa peranan bagi perusahaan. Penilaian kinerja keuangan dapat mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan, untuk menentukan atau mengukur efisiensi setiap bagian, proses atau produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, untuk menilai dan mengukur hasil kerja pada tiap-tiap bagian individu yang telah diberikan wewenang dan tanggungjawab serta untuk menentukan perlu tidaknya digunakan

kebijaksanaan atau prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik (Munawir, 2002; Wild & Halsey, 2005).

## **2.1.2 Analisis Kinerja**

### **2.1.2.1 Pengertian Analisis Kinerja**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya); Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; Penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya; Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkret. Usulan anggaran pada umumnya telah terlebih dahulu ditelaah oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Penyusunan anggaran pada organisasi sektor publik dapat membantu mewujudkan akuntabilitas. Berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan, masyarakat secara tidak langsung dapat melakukan pengawasan atau pengendalian (Mahsun, 2012).

Menurut (Mahsun, 2006), Analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran kinerja tradisional yang membandingkan antara anggaran dengan realisasi tanpa melihat keberhasilan program pengukuran kinerja ditekankan pada input yaitu jika

terjadinya *Overspending* dan *Under Spending*. Analisis prestasi dalam hal ini adalah kinerja keuangan dari pemerintahan daerah itu sendiri yang dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk pemenuhan seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah.

### **2.1.3 Pengukuran Kinerja Keuangan**

#### **2.1.3.1 Analisis Efektivitas PAD**

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Munawir, 2004).

$$Efektivitas\ PAD = \frac{anggaran\ PAD}{Realisasi\ PAD} \times 100\%$$

PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya.

Kriteria Rasio Efektivitas menurut (Mahsun, 2012) adalah :

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti tidak efektif.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti efektivitas berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti efektif.

#### **2.1.3.2 Analisis Pertumbuhan**

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010, 2016). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan

dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim, 2007).

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD dan Belanja Modal yang diikuti maka semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD dan Belanja Operasi yang diikuti maka semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

### **2.1.3.3 Analisis Kemandirian**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) (Welsch & dkk, 2012) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman (Halim, 2007).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer (sumber data ekstern) (Sinambela & F.S, 2018).

Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

**Tabel 2.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Oppier (2013)

- 1) Pola Hubungan Instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

- 2) Pola Hubungan Konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola Hubungan Delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

## **2.1.4 Anggaran**

### **2.1.4.1 Pengertian Anggaran**

Anggaran adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji dan kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut.

Anggaran dianggap sistem yang otonom, karena mempunyai sasaran dan tahapan-tahapan yang ke semua nya memiliki tahapan pertanggungjawaban. Anggaran adalah rencana manajemen dengan anggapan bahwa penyusunan anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasikan anggaran yang telah disusun. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena merupakan

perencanaan awal dalam realisasi yang memfasilitasi tercapainya kegiatan pemerintahan yang apabila dalam anggaran tersebut tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja yang akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Menurut (Indra Bastian, 2010:191) berdasarkan *National Committee Governmental Accounting Standards Board (GASB)*, definisi anggaran adalah “Rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.” Pengertian anggaran menurut (Sri Rahayu & Andry Arifian Rachman, 2013:4) anggaran adalah “Anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian.”

Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, memutuskan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat. Uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut.

Anggaran dianggap sistem yang otonom karena mempunyai sasaran dan tahapan-tahapan yang ke semua nya memiliki tahapan pertanggungjawaban. Anggaran adalah rencana manajemen dengan anggapan bahwa penyusun anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasikan anggaran yang telah disusun. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena merupakan perencanaan awal dalam realisasi (*plan for action*) yang memfasilitasi tercapainya

kegiatan pemerintahan yang apabila dalam anggaran tersebut tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Menurut (Mardiasmo, 2009) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Proses penyusunan anggaran sektor publik pada umumnya disesuaikan dengan Peraturan Lembaga yang lebih tinggi yang didasarkan pada (*Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*, 2004) sehingga lahir lah tiga paket Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan dan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat.

Kemudian keluar peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 (saat ini telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan menggantikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002.

Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu proses dalam meningkatkan manfaat sumber daya input untuk pencapaian hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) melalui *Key Performance Indicators* (KPI) yang terkait dengan 3 (tiga) hal, yaitu pengukuran kinerja, pengukuran biaya untuk menghasilkan

penggunaan informasi kinerja *outcome* dan *output* serta penilaian keefektifan dan efisiensi anggaran dengan berbagai alat analisis. Dengan tujuan alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (Peraturan Pemerintah No. 55, 2005).

Menurut (Mulyadi, 2001) ada beberapa karakteristik anggaran antara lain :

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan keuangan lainnya.
2. Umum nya mencakup jangka waktu 1 tahun.
3. Berisi komitmen atau kesanggupan manajemen yang berarti bahwa manajer setuju untuk menerima tanggungjawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan anggaran.
4. Usulan anggaran di *review* dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu.
6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya di analisis dan dijelaskan.

Dari karakteristik diatas dapat diketahui bahwa anggaran menjadi alat yang penting bagi manajemen dalam melaksanakan tugas nya. Sebagai alat untuk membantu pencapaian tujuan, anggaran dapat diandalkan karena dibuat berdasarkan analisa data-data tahun yang lalu dan proyeksi tahun yang akan datang.

Karakteristik anggaran yang baik menurut (Mariani, 2006) :

1. Anggaran disusun berdasarkan program.
2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi.

3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

Pembelajaran Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil kerja atau *outcome* dari pengalokasian biaya yang didasarkan pada kegiatan atau program kerja yang akan dilaksanakan. Dalam implementasi nya, anggaran berbasis kinerja juga menekankan pada penggunaan dana yang dialokasikan secara ekonomis, efektif dan efisien. Dengan kata lain anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang mengkaitkan alokasi anggaran yang diklasifikasikan berdasarkan kegiatan atau program kerja dengan hasil kerja.

Dengan demikian struktur anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan dan pembiayaan yang di rinci menurut kegiatan atau program kerja yang akan dilaksanakan setiap unit kerja dan jenis anggaran. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Sedangkan pembiayaan adalah transaksi keuangan dalam bentuk pengeluaran pendapatan untuk kegiatan anggaran.

Pengembangan indikator keberhasilan (Nordiawan, 2016) menggunakan kriteria :

1. Relevan, secara logis dan langsung berhubungan dengan tujuan dan sasaran unit kerja, program atau kegiatan.
2. Mudah dipahami, dapat di komunikasikan dengan jelas.
3. Konsisten, digunakan secara seragam dalam perencanaan, penganggaran, sistem akuntansi dan pelaporan.
4. Dapat dibandingkan, dapat menunjukkan perkembangan dan perbedaan kinerja dari program atau kegiatan yang sejenis.

5. Andal (*reliable*) diperoleh dari sistem data yang terkendali dan dapat di verifikasi.

Beberapa hambatan dapat diketahui dengan :

1. Realisasi penyerapan anggaran termasuk anggaran yang dipengaruhi oleh bagaimana pola perencanaan dan penganggaran di daerah, mekanisme transfer dan pelaksanaan program/kegiatan di daerah.
2. Dalam proses perencanaan anggaran di daerah, permasalahan yang sering dihadapi adalah adanya perbedaan program-program prioritas antara pihak eksekutif dengan DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD antara pemerintah daerah dengan legislatif.
3. Realisasi anggaran di daerah pada akhir tahun anggaran seringkali masih di bawah target atau lebih rendah dibandingkan dengan anggarannya.

Hal ini ditengarai karena beberapa hal yaitu (PPAS Perubahan APBD, 2019) :

- a) Terkadang peraturan daerah mempunyai kecenderungan untuk melakukan perubahan APBD sekitar bulan Agustus-September tahun anggaran berjalan, setelah diketahuinya hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun sebelumnya sehingga dapat mengetahui secara pasti berapa besarnya Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
- b) Adanya pelampauan pendapatan, besarnya angka SiLPA dan penetapan perubahan APBD menjelang akhir tahun anggaran berjalan mengakibatkan waktu yang tersisa untuk menyesuaikan anggaran dan merealisasikannya terbatas sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan dan rendahnya kualitas penyelesaian kegiatan.

Dari beberapa definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan suatu organisasi yang diwujudkan dalam bentuk finansial dan disusun secara sistematis untuk periode waktu tertentu yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut.

#### **2.1.4.2 Fungsi Anggaran**

Bagi organisasi sektor publik seperti instansi pemerintah. Anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya (Mardiasmo, 2009) menguraikan fungsi utama anggaran sektor publik sebagai berikut :

1. Alat Perencanaan (*Planning Tool*)
2. Alat Pengendalian (*Control Tool*)
3. Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)
4. Alat Politik (*Political Tool*)
5. Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordinatin and Communication Tool*)
6. Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)
7. Alat Motivasi (*Motivation Tool*)
8. Alat Menciptakan Ruang Publik (*Public Sphere*)

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Anggaran sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*)

Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.

- 2) Anggaran sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*)

Dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*Overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*Mis Spending*).

3) Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)

Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4) Anggaran sebagai Alat Politik (*Political Tool*)

Dalam organisasi sektor publik dan melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.

5) Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordinatin and Communication Tool*)

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya.

6) Anggaran sebagai Alat Penilaian Kerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran adalah suatu ukuran yang biasa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

7) Anggaran sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat motivasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.

- 8) Anggaran sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Sphere*) Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

### **2.1.4.3 Proses Penyusunan Anggaran**

Untuk menyusun suatu anggaran atau rencana laba, terdapat langkah-langkah tertentu yang perlu diambil, yaitu :

- a. Manajemen puncak harus memutuskan apa yang menjadi tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan untuk mencapainya.
- b. Tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan.
- c. Suatu anggaran yang komprehensif harus disusun, kemudian disetujui oleh manajemen puncak. Setelah disetujui, anggaran harus dikomunikasikan kepada penyelia dan karyawan yang kinerjanya dikendalikan.
- d. Anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidangbidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik.

### **2.1.5 Realisasi**

#### **2.1.5.1 Pengertian Realisasi Anggaran**

Menurut (Prasetya, 2005) dalam bukunya yang berjudul "*Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*" menjelaskan: "Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan."

#### **2.1.5.2 Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintahan pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran atau realisasi nya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan jabatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Unsur-unsur yang mencakup secara langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah (KSAP) yang mencakup komite yang dibentuk oleh Departemen Keuangan RI yaitu untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam (*Pelaporan Keuangan, Akuntansi Dan Audit Di Pemerintahan*, 2009) terdiri dari :

1. Pendapatan (Basis Kas) adalah hak penerimaan oleh Bendaharawan Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Pendapatan (Basis Akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
3. Belanja (Basis Kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendaharawan Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali ke pemerintah.
4. Belanja (Basis Akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

5. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
6. Pembiayaan (*Financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang berada dalam penganggaran. Pemerintahan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
7. Penerimaan pembayaran antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran penerimaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

#### **2.1.5.3 Periode Ketepatan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Selain itu, Laporan Realisasi Anggaran ini juga disajikan 2 kali setahun, yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahunan disajikan dengan satu periode yang berubah lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut :

- a) Anggaran alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
- b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

#### **2.1.5.4 Ketepatan Waktu Pelaporan**

Ketepatan waktu merupakan hal yang harus diperhatikan sekali dalam pelaporan keuangan karena dapat mengefisiensi waktu pengambilan keputusan berdasarkan hasil pelaporan keuangan, semesteran atau laporan keuangan tahunan.

#### **2.1.5.5 Manfaat Pelaporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran (M. Sari, 2021).

Disamping hal di atas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk menandai kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan indikasi tentang perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

### **2.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan sehubungan topik penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti/Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Roland Gerald Tooy, David Paul Elia Saerang, Lidia Mawikere (2016) Judul Berkala Ilmiah Efisiensi	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Minahasa Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam laporan realisasi anggaran dapat dilihat dari tingkat perhitungan efisiensi Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan rumus, yaitu rasio perbandingan dan diberikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian, maka tingkat efisiensi Laporan Realisasi Anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2011-2015 kurang efisien dalam penggunaan Laporan Realisasi Anggaran.</li> </ul>
2	Astria Nur Jannah Dien, Jantje Tinangon, Stanley Walandouw (2015) ISSN 2303-1174	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung mampu memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang ditargetkan dengan tingkat efektivitas diatas 100%.</li> </ul>
3	D. Kartika, AB Setiawan, IC. Kusuma (2016) Jurnal Sosial Humaniora	Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Dan Efektivitas Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Sukabumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kemandirian keuangan Kabupaten Sukabumi dari tahun 2009 sampai 2013 tergolong sangat rendah dengan menunjukkan pola hubungan instruktif.</li> </ul>
4	Ramlah Basri (2013) ISSN 2303-1174	Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada Bpm-Pd Provinsi Sulawesi Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman</li> </ul>

No	Peneliti/Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 baik dari proses maupun jadwal atau waktu penyusunan anggaran.
5	Rukayah Nurgrahini Kusumawati, Raden Irna Afriani (2017) Jurnal Akuntansi	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektivitas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 dilihat dari perhitungan rata-rata Rasio Efektivitasnya termasuk dalam kriteria sangat efektif.</li> </ul>

### 2.3 Kerangka Berfikir

Penyusunan anggaran dalam pembiayaan di suatu instansi pemerintah merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan instansi tersebut dalam mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu suatu instansi pemerintah dituntut mempunyai pimpinan yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien, maka perlu adanya alat bantu untuk melaksanakannya, salah satu alat tersebut adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat langsung dinyatakan dalam bentuk baik atau tidaknya, karena penilaian kinerja yang ada pada pemerintahan tidaklah sama dengan penilaian kinerja pada perusahaan-perusahaan yang memperoleh laba dalam pelaksanaan teknisnya.

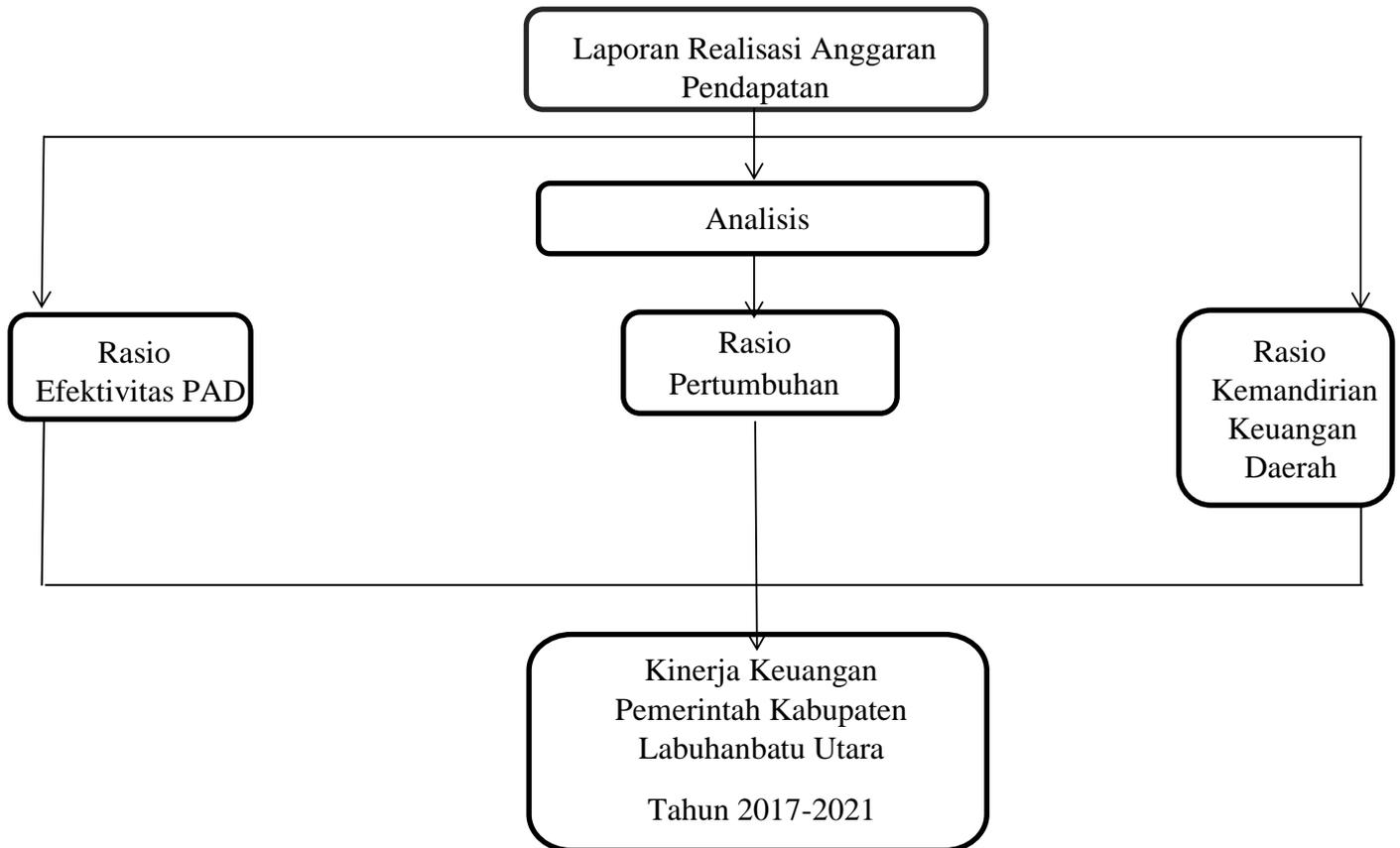
Pengukuran kinerja anggaran ini dapat menggunakan Analisis Rasio Keuangan Daerah yaitu Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kecerahan, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah untuk

mengetahui seberapa besar anggaran dan realisasi terwujud dalam suatu instansi dapat dilihat melalui seberapa jauh pemenuhan pada anggaran kegiatan yang digunakan oleh instansi (Halim, 2013). Misalnya dengan melihat pertumbuhan pada masing-masing anggaran, apakah pertumbuhan tersebut rasional atau efektif dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik atau tidak. Pengukuran kinerjanya dapat menggunakan analisis pertumbuhan anggaran pendapatan seperti Analisis Rasio Keuangan Daerah.

Laporan keuangan merupakan suatu informasi keuangan dari sebuah entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Penulis menggunakan data pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kantor Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mengukur tingkat kinerja keuangan dilihat dari Analisis Rasio Keuangan Daerah yaitu Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, keefektifan, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik (Alpi, M. F, dan Ramadhan, 2018)

Untuk memberikan gambaran yang jelas sehubungan dengan kerangka pemikiran pada penelitian ini akan disajikan gambaran kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1**

**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan karakteristik suatu fenomena yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah-masalah bisnis. Jenis pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu fenomena yang terjadi dalam keadaan nyata pada waktu penelitian dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *Deskriptif* yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi definisi operasional nya adalah Kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Menurut (Bastian, 2006) “Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Indikator kinerja

adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.”

Analisis Kinerja Kantor Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan menggunakan konsep Analisis Rasio Keuangan Daerah merupakan pengukuran kinerja keuangan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa efisien dan efektif kinerja dari satuan kerja perangkat daerah tersebut pada setiap periode.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Penilaian Kinerja Keuangan. Definisi variabel dari penelitian tersebut adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan.
2. Penilaian kinerja keuangan yaitu penentuan efektivitas operasional, organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Untuk menilai kinerja keuangan daerah pada penelitian ini menggunakan beberapa rasio keuangan daerah yaitu :

### **Rasio Efektivitas PAD**

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010). Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan anggaran penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya.

$$Efektivitas\ PAD = \frac{anggaran\ PAD}{Realisasi\ PAD} \times 100\%$$

### **Rasio Pertumbuhan**

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010c). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

r = Rasio Pertumbuhan

$P_n$  = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

$P_0$  = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan

retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\%$$

RKKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

#### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini direncanakan mulai pada bulan Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
		Juni 2023				Juli 2023				Agustus 2023				September 2023				Oktober 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																			
2	Riset Awal		■																		
3	Pembuatan Proposal			■	■	■	■	■	■												
4	Bimbingan Proposal						■	■	■	■	■	■	■								
5	Seminar Proposal												■								
6	Riset												■								
7	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■				
8	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																							
		Juni 2023				Juli 2023				Agustus 2023				September 2023				Oktober 2023							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
9	Sidang Meja Hijau																								

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data Kuantitatif. Pendekatan Kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini data kuantitatif nya berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kantor Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017-2021.

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah :

- a. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri, antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, catatan dan sumber-sumber kepustakaan. Data ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017-2021.
- b. Data primer, merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian. Data ini berupa hasil wawancara dengan pegawai di Kantor Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Dokumentasi, yaitu jenis data yang digunakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung ataupun langsung berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun yang dipublikasikan yaitu bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pemkab Labuhanbatu Utara Tahun 2017-2021 yang dibutuhkan oleh peneliti.
2. Wawancara (Interview), yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang yaitu pada pegawai tetap Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun kisi-kisi wawancara dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Kisi-Kisi Wawancara**

No	Variabel	Indikator	Butir Pertanyaan
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi PAD</li> <li>2. Anggaran PAD</li> <li>3. Realisasi Belanja Daerah</li> <li>4. Realisasi Pendapatan Daerah</li> </ol>	1,2,3,4
2	Penilaian Kinerja Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Efektivitas PAD</li> <li>2. Rasio Pertumbuhan</li> <li>3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah</li> </ol>	1,2,3

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan serta menafsirkan data yang bentuk deskriptif nya menggunakan angka atau numerik (statistik) sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

Tahapan-tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data dari objek penelitian.
2. Mencari teori yang mendukung analisis penelitian.
3. Menganalisis data yang ada yaitu Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan Daerah.
4. Menghitung rasio keuangan daerah melalui Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
5. Melakukan analisis dari perhitungan rasio keuangan daerah.
6. Menarik kesimpulan dan saran.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

Sebutan Labuhanbatu bermula ketika pada tahun 1862 Angkatan Laut Belanda datang ke sebuah kampung di Hulu Labuhanbilik tepatnya di Desa Sei Rakyat sekarang. Di kampung ini Belanda membangun tempat pendaratan kapal dari batu beton. Tempat ini berkembang menjadi tempat persinggahan dan pendaratan kapal yang kemudian menjadi kampung besar dengan nama Pelabuhanbatu. Masyarakat mempersingkat sebutannya menjadi Labuhanbatu, nama ini kemudian melekat dan ditetapkan menjadi nama wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Labuhanbatu Utara lahir dari tuntutan aspirasi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Labuhanbatu Utara.

##### **4.1.2. Deskriptif Data**

Data yang digunakan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara berupa Laporan

Realisasi Anggaran dan data primer yang didapat dari wawancara sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini juga termasuk data atas keterangan yang terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran instansi pemerintah, sesuai dengan permasalahan dan perumusan yang telah dikemukakan.

#### **4.1.2.1. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan**

Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dilihat dari laporan realisasi anggaran pendapatan dalam kurun waktu 2017-2021. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada penelitian ini adalah Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang didapat dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Utara**  
**Tahun 2017**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.086.866.263.570</b>	<b>1.050.277.014.266</b>	<b>96,63</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>53.221.965.850</b>	<b>52.690.086.354</b>	<b>99,00</b>
Pendapatan Pajak Daerah	24.190.300.000	24.578.664.147	101,61
Pendapatan Retribusi Daerah	9.331.052.000	7.785.261.500	83,43
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.473.679.216	1.473.679.216	100,00

Uraian	Anggaran	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
Lain-lain PAD Yang Sah	18.226.934.634	18.852.481.491	103,43
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>910.189.355.120</b>	<b>881.817.590.895</b>	<b>96,88</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>866.846.070.000</b>	<b>839.472.606.186</b>	<b>96,84</b>
Bagi Hasil Pajak	34.849.475.000	23.894.345.777	68,56
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.122.021.000	859.727.262	40,51
Dana Alokasi Umum (DAU)	588.021.836.000	588.021.836.000	100,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	144.982.192.000	137.890.714.885	95,11
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	96.870.546.000	88.805.982.262	91,67
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>43.343.285.120</b>	<b>42.344.984.709</b>	<b>97,70</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	43.343.285.120	42.344.984.709	97,70
<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	0	0	0,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>123.454.942.600</b>	<b>115.769.337.017</b>	<b>93,77</b>
Pendapatan Hibah	10.769.803.600	3.429.627.100	31,84
Pendapatan Dana Desa dari APBN	68.646.939.000	68.646.939.000	100,00
Dana BOS	44.038.200.000	43.692.770.917	99,22

Sumber : BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara

**Tabel 4.2**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
<b>PENDAPATAN</b>	<b>837.030.764.177</b>	<b>1.033.343.832.203</b>	<b>123,45</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>51.069.120.952</b>	<b>57.010.690.545</b>	<b>111,63</b>
Pendapatan Pajak Daerah	24.240.000.000	23.777.583.631	98,09
Pendapatan Retribusi Daerah	10.092.928.000	9.480.812.321	93,94
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000	2.866.451.770	143,32
Lain-lain PAD Yang Sah	14.736.192.952	20.885.842.822	141,73
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>717.925.122.225</b>	<b>906.591.141.658</b>	<b>126,28</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>697.779.268.000</b>	<b>864.256.204.242</b>	<b>123,86</b>
Bagi Hasil Pajak	29.678.213.000	35.349.065.495	119,11
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.414.779.000	5.769.808.457	168,97
Dana Alokasi Umum (DAU)	588.021.836.000	588.021.836.000	100,00

Uraian	Anggaran	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	0	141.709.129.850	0
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	76.664.440.000	93.406.364.440	121,84
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>20.145.854.225</b>	<b>32.541.776.416</b>	<b>161,53</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.145.854.225	32.541.776.416	161,53
<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>0</b>	<b>9.793.161.000</b>	<b>0,00</b>
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	0	9.793.161.000	0,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>68.036.521.000</b>	<b>69.742.000.000</b>	<b>102,51</b>
Pendapatan Hibah	0	2.000.000.000	0,00
Pendapatan Dana Desa dari APBN	68.036.521.000	67.742.000.000	99,57
Dana BOS	0	0	0,00

**Sumber : BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara**

**Tabel 4.3**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.100.453.668.210</b>	<b>1.082.495.846.011</b>	<b>98,37</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>62.805.708.468</b>	<b>70.122.562.532</b>	<b>111,65</b>
Pendapatan Pajak Daerah	26.085.000.000	26.316.419.960	100,89
Pendapatan Retribusi Daerah	14.651.528.000	14.881.014.664	101,57
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.200.000.000	2.732.595.137	85,39
Lain-lain PAD Yang Sah	18.869.180.468	26.192.532.770	138,81
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>904.005.032.742</b>	<b>874.067.517.898</b>	<b>96,69</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>840.336.100.000</b>	<b>817.231.451.960</b>	<b>97,25</b>
Bagi Hasil Pajak	40.382.704.000	32.849.044.481	81,34
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.001.866.000	3.342.990.279	66,83
Dana Alokasi Umum (DAU)	611.629.351.000	611.629.351.000	100,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	81.560.675.000	75.171.813.692	92,17
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	101.761.504.000	94.238.252.508	92,61
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>63.668.932.742</b>	<b>56.836.065.938</b>	<b>89,27</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	63.668.932.742	56.836.065.938	89,27
<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Uraian	Anggaran	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	0	0	0
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>133.642.927.000</b>	<b>138.305.765.581</b>	<b>103,49</b>
Pendapatan Hibah	12.000.000.000	12.000.000.000	100,00
Pendapatan Dana Desa dari APBN	79.123.527.000	78.844.864.200	99,65
Dana BOS	42.519.400.000	47.460.901.381	111,62

**Sumber : BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara**

**Tabel 4.4**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Utara**  
**Tahun 2020**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
<b>PENDAPATAN</b>	<b>974.702.200.952</b>	<b>968.329.052.089</b>	<b>99,35</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>55.920.283.256</b>	<b>55.494.095.702</b>	<b>99,24</b>
Pendapatan Pajak Daerah	22.835.000.000	22.137.549.427	96,95
Pendapatan Retribusi Daerah	14.447.845.000	13.713.581.114	94,92
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.880.000.000	2.215.622.549	76,93
Lain-lain PAD Yang Sah	15.757.438.256	17.427.342.612	110,60
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>782.326.833.696</b>	<b>770.468.802.360</b>	<b>98,48</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>731.596.543.715</b>	<b>719.527.169.929</b>	<b>98,35</b>
Bagi Hasil Pajak	28.645.431.151	20.703.595.567	72,28
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.491.881.401	3.256.387.769	93,26
Dana Alokasi Umum (DAU)	562.859.404.000	560.374.058.000	99,56
Dana Alokasi Khusus (DAK)	36.955.643.000	36.277.511.178	98,17
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	99.644.184.163	98.915.617.415	99,27
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>13.415.171.000</b>	<b>13.415.171.000</b>	<b>100,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	13.415.171.000	13.415.171.000	100,00
<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>37.315.118.981</b>	<b>37.526.461.431</b>	<b>100,57</b>
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	37.315.118.981	37.526.461.431	100,57
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>136.455.084.000</b>	<b>142.366.154.027</b>	<b>104,33</b>
Pendapatan Hibah	8.000.000.000	8.000.000.000	100,00
Pendapatan Dana Desa dari APBN	82.689.984.000	82.689.984.000	100,00

Uraian	Anggaran	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
Dana BOS	45.765.100.000	51.676.170.027	112,92

Sumber : BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara

**Tabel 4.5**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021**

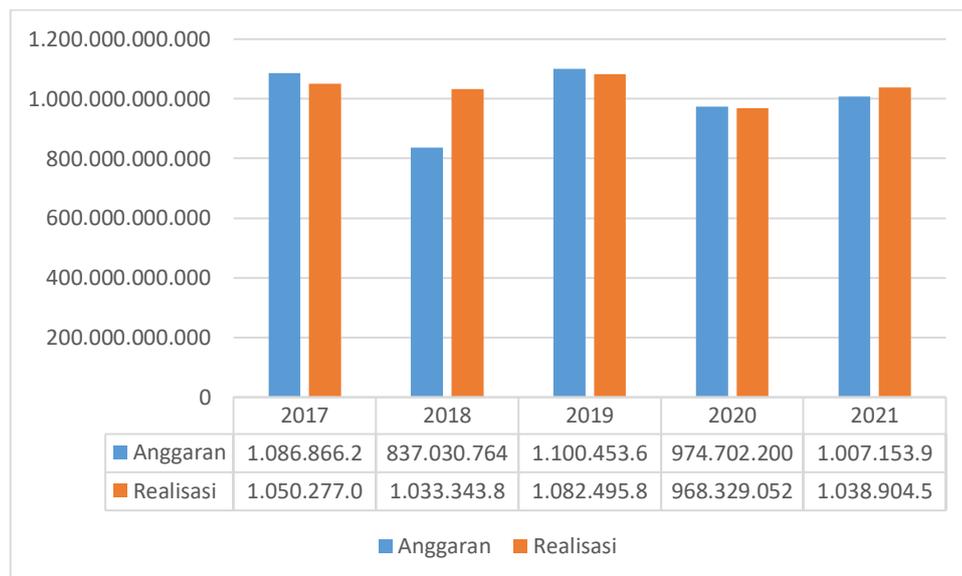
Uraian	Anggaran	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.007.153.937.249</b>	<b>1.038.904.587.062</b>	<b>103,15</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>63.224.132.754</b>	<b>58.863.185.741</b>	<b>93,10</b>
Pendapatan Pajak Daerah	26.615.000.000	26.478.501.873	99,49
Pendapatan Retribusi Daerah	16.863.350.000	12.223.550.828	72,49
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.592.000.000	2.968.678.043	114,53
Lain-lain PAD Yang Sah	17.153.782.754	17.192.454.996	100,23
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>898.990.445.846</b>	<b>931.448.207.672</b>	<b>103,61</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>861.100.946.000</b>	<b>888.058.707.826</b>	<b>103,13</b>
Dana Perimbangan	767.708.317.000	795.136.081.434	103,57
Dana Insentif Daerah (DID)	7.369.788.000	7.369.788.000	100,00
Dana Desa	86.022.841.000	85.552.838.392	99,45
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>37.889.499.846</b>	<b>43.389.499.846</b>	<b>114,52</b>
Pendapatan Bagi Hasil	37.889.499.846	43.389.499.846	114,52
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>44.939.358.649</b>	<b>48.593.193.649</b>	<b>108,13</b>
<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	44.939.358.649	48.593.193.649	108,13

Sumber : BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa perencanaan atas anggaran pada tahun 2017 s/d 2021 telah disetujui, pada tahun 2017, 2019 dan 2020 realisasi anggaran pendapatan tidak mencapai anggaran yang direncanakan dan pada tahun 2020 realisasi anggaran pendapatan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Pada realisasi dan anggaran pendapatan tahun 2018 dan tahun 2020 mengalami penurunan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017-2021 terjadinya perbedaan setiap tahun nya, dapat dilihat perkembangan pada Grafik Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemkab Labuhan Utara Tahun 2017-2021 :



**Gambar 4.1**  
**Grafik Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemkab**  
**Labuhanbatu Utara Tahun 2017-2021**

Berdasarkan pada gambar 4.1 terlihat bahwa untuk anggaran pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 anggaran dan realisasi pendapatan mengalami penurunan dari tahun 2017 kemudian pada tahun 2019 anggaran dan realisasi pendapatan mengalami kenaikan lalu pada tahun 2020 anggaran dan realisasi pendapatan mengalami penurunan dan pada tahun 2021 anggaran dan realisasi pendapatan mengalami kenaikan.

#### **4.1.2.2 Analisis Efektivitas PAD**

Analisis Efektivitas PAD digunakan untuk menilai selisih antara total realisasi belanja yang digunakan oleh daerah dengan total realisasi pendapatan yang diterima oleh daerah agar selisih dari realisasi belanja daerah dan pendapatan daerah tersebut dapat tergambar dengan jelas. Keefektifan keuangan daerah dapat dilihat melalui hasil perhitungan rasio efektivitas. (Sudaryono, 2017) menjelaskan bahwa “Rasio Efektivitas PAD merupakan suatu rumus yang digunakan untuk mengukur kekuatan daerah dalam mengaktualisasikan pendapatan daerah yang di agendakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah agar seberapa besar tingkat kemampuan daerah dapat tergambar dengan jelas.” Analisis Efektivitas PAD dirumuskan sebagai berikut :

$$Efektivitas\ PAD = \frac{Realisasi\ PAD}{Anggaran\ PAD} \times 100$$

$$\begin{aligned} Tahun\ 2017 &= \frac{52.690.086.354}{53.221.965.850} \times 100 \\ &= 99\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Tahun\ 2018 &= \frac{57.010.690.545}{51.069.120.952} \times 100 \\ &= 111,63\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Tahun\ 2019 &= \frac{70.122.562.532}{62.805.708.468} \times 100 \\ &= 111,65\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Tahun\ 2020 &= \frac{55.494.095.702}{55.920.283.256} \times 100 \\ &= 99.23\% \end{aligned}$$

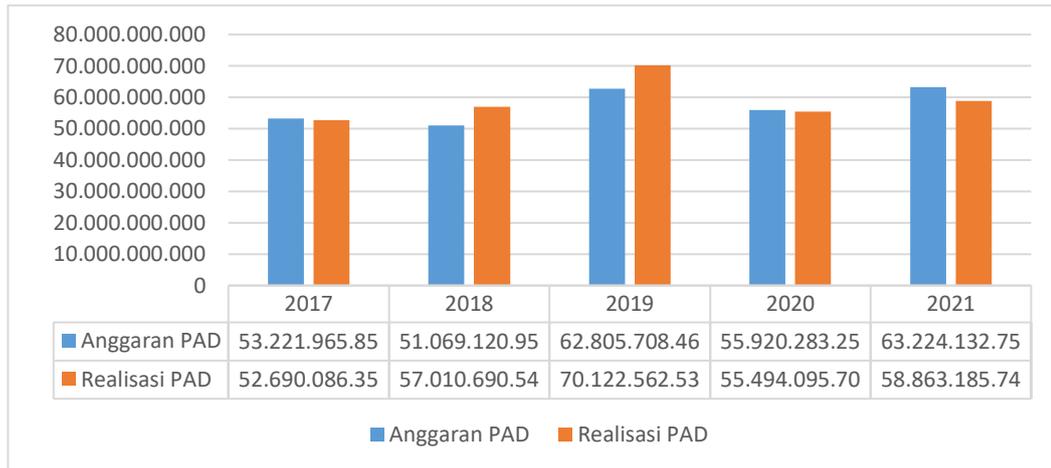
$$\begin{aligned} Tahun\ 2021 &= \frac{58.863.185.741}{63.224.132.754} \times 100 \\ &= 93.10\% \end{aligned}$$

**Tabel 4.6**  
**Analisis Efektivitas PAD Anggaran dan Realisasi Kabupaten Labuhanbatu**  
**Utara Tahun 2017-2021**

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Persentase Efektivitas	Kriteria
2017	53.221.965.850	52.690.086.354	99%	Tidak Efektif
2018	51.069.120.952	57.010.690.545	111,63%	Efektif
2019	62.805.708.468	70.122.562.532	111,65%	Efektif
2020	55.920.283.256	55.494.095.702	99,23%	Tidak Efektif
2021	63.224.132.754	58.863.185.741	93,10%	Tidak Efektif

**Sumber : Data diolah (2023)**

Dari tabel 4.2 diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun anggaran 2017,2020 dan 2021 tidak mencapai target yang diinginkan. Dalam kategori tidak efektif dalam merealisasikan anggaran tahun 2017 sebesar 99% tahun 2020 sebesar 99,23% tahun 2021 sebesar 93,10% karena tidak mencapai angka 100% dan dalam kategori efektif dalam merealisasikan anggaran tahun 2018 sebesar 111,63% tahun 2019 sebesar 111,65% karena mencapai angka diatas 100%. Tingkat analisis efektivitas yang tertinggi adalah pada tahun anggaran 2019 karena mencapai angka sebesar 111,65%. Hal ini karena realisasi pendapatan asli daerah lebih besar dari anggaran pendapatan asli daerah sesuai dengan kriteria rasio efektivitas menurut Mahsun (2012) yang menyatakan bahwa jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti tidak efektif, jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efektivitas berimbang dan jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti efektif.



**Gambar 4.2**  
**Grafik Perkembangan Analisis Efektivitas PAD Kabupaten**  
**Labuhanbatu Utara**

Berdasarkan pada gambar 4.2 terlihat pada grafik perkembangan Analisis Efektivitas PAD pada tahun 2017 – 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 anggaran PAD mengalami penurunan tetapi realisasi PAD mengalami kenaikan dari tahun 2017 kemudian pada tahun 2019 anggaran dan realisasi PAD mengalami kenaikan lalu pada tahun 2020 anggaran dan realisasi PAD mengalami penurunan dan pada tahun 2021 anggaran dan realisasi PAD mengalami kenaikan.

#### **4.1.2.3 Analisis Pertumbuhan**

Analisis Pertumbuhan bermanfaat untuk mengukur perkembangan anggaran dari tahun ke tahun bersifat positif atau negative (Hanum, 2011). Analisis Pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan masing-masing anggaran, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis Pertumbuhan ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan

dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim, 2007).

Analisis Pertumbuhan dirumuskan sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{1.050.277.014.266 - 0}{0} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{1.033.343.832.203 - 1.050.277.014.266}{1.050.277.014.266} \times 100 \\ &= -1.61 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{1.082.495.846.011 - 1.033.343.832.203}{1.033.343.832.203} \\ &= 4.76 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{968.329.052.089 - 1.082.495.846.011}{1.082.495.846.011} \\ &= -10.55 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{1.038.904.587.062 - 968.329.052.089}{968.329.052.089} \\ &= 7.29 \end{aligned}$$

**Tabel 4.7**  
**Analisis Pertumbuhan Keuangan Daerah Tahun 2017-2021**

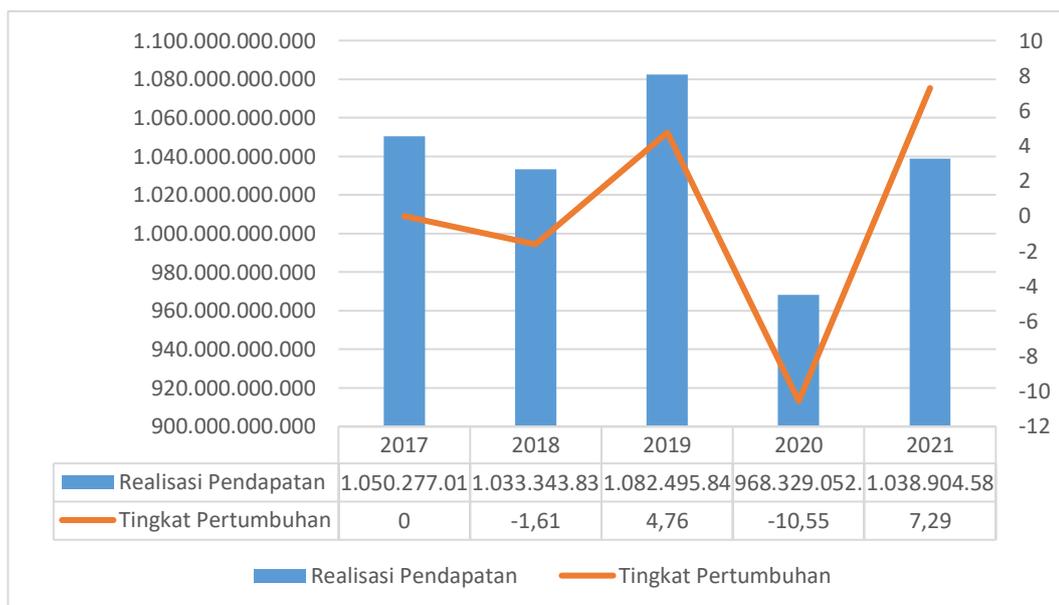
No	Tahun	Realisasi Pendapatan	Tingkat Pertumbuhan
1	2017	1.050.277.014.266	0
2	2018	1.033.343.832.203	-1.61
3	2019	1.082.495.846.011	4.76
4	2020	968.329.052.089	-10.55
5	2021	1.038.904.587.062	7.29

**Sumber : Data diolah (2023)**

Berdasarkan data di atas dapat dilihat untuk tahun anggaran 2017-2019 tingkat pertumbuhan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 dan 2021 tingkat pertumbuhan

bernilai positif yaitu 4.76 dan 7.29 sedangkan untuk tahun 2018 dan 2020 tingkat pertumbuhan bernilai negatif yaitu -1.61 dan -10.55 disebabkan oleh realisasi anggaran mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini terjadi karena anggaran juga mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2021 tingkat pertumbuhan mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Perhitungan Analisis Pertumbuhan dapat dilihat pada Grafik berikut :



**Gambar 4.3**  
**Grafik Perkembangan Analisis Pertumbuhan Tahun 2017-2021**

Berdasarkan pada gambar 4.3 terlihat grafik perkembangan analisis pertumbuhan pada tahun 2017-2019 untuk realisasi anggarannya mengalami kenaikan dan juga pada tahun 2019-2021 untuk realisasi anggarannya mengalami penurunan.

#### 4.1.2.4 Analisis Kemandirian

Analisis Kemandirian ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman (Halim, 2007). Analisis Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Analisis Kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Analisis Kemandirian dirumuskan sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

$$Tahun 2017 = \frac{52.690.086.354}{881.817.590.895} \times 100\% = 5,97\%$$

$$Tahun 2018 = \frac{57.010.690.545}{906.591.141.658} \times 100\% = 6,28\%$$

$$Tahun\ 2019 = \frac{70.122.562.532}{874.067.517.898} \times 100\% = 6,31\%$$

$$Tahun\ 2020 = \frac{55.494.095.702}{770.468.802.360} \times 100\% = 8,02\%$$

$$Tahun\ 2021 = \frac{58.863.185.741}{931.448.207.672} \times 100\% = 7,20\%$$

**Tabel 4.8**  
**Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2017-2021**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Persentase Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2017	52.690.086.354	881.817.590.895	5,97%	Rendah Sekali	Instruktif
2018	57.010.690.545	906.591.141.658	6,28%	Rendah Sekali	Instruktif
2019	70.122.562.532	874.067.517.898	6,31%	Rendah Sekali	Instruktif
2020	55.494.095.702	770.468.802.360	8,02%	Rendah Sekali	Instruktif
2021	58.863.185.741	931.448.207.672	7,20%	Rendah Sekali	Instruktif

**Sumber : Data diolah (2023)**

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2020 kemandirian keuangan daerah mengalami kenaikan, pada tahun 2021 kemandirian mengalami penurunan dengan pola hubungan instruktif. Hal ini sesuai dengan pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah menurut Oppier (2013) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian 0% sampai 25% kemampuan keuangan daerah rendah sekali dan memiliki pola hubungan instruktif yang artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.



**Gambar 4.4**  
**Grafik Perkembangan Analisis Kemandirian Kabupaten**  
**Labuhanbatu Utara**

Berdasarkan pada gambar 4.4 terlihat grafik perkembangan analisis kemandirian untuk tahun 2017-2019 pada Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dan pendapatan transfer mengalami kenaikan dan pada tahun 2019 pendapatan transfer mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2019-2021 pada Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dan kenaikan begitu juga dengan pendapatan transfer mengalami kenaikan dan penurunan.

## 4.2 Pembahasan

### 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017-2021

Hasil pengolahan data menunjukkan selisih antara realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan tahun 2017, 2019 dan 2020. Pada tahun 2017 selisih antara realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan sebesar Rp 36.589.249.304 dengan total realisasi pendapatan sebesar Rp 1.050.277.014.266 dan total anggaran pendapatan sebesar Rp 1.086.866.263.570. Persentase realisasi terhadap anggaran pendapatan tersebut adalah 96,36%.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD pada BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari empat bentuk pendapatan yaitu : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Total anggaran PAD yang ditargetkan untuk tahun 2017 sebesar Rp 53.221.965.850 dan total realisasi PAD yang diperoleh sebesar Rp 52.690.086.354. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa presentase realisasi PAD yang diperoleh sebesar 99,00%. Nilai persentase realisasi di atas menunjukkan bahwa keseluruhan PAD yang terealisasi tidak mencapai jumlah keseluruhan PAD yang telah dianggarkan.

Pada Pendapatan Pajak Daerah diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 24.578.664.147 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 24.190.300.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 101,61%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan yang terealisasi melebihi keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

Pada Pendapatan Retribusi Daerah diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 7.785.261.500 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 9.331.052.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 83,43%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan yang terealisasi tidak mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

Pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 1.473.679.216 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 1.473.679.216. Persentase realisasinya adalah sebesar 100%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan

yang terealisasi mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

Pada Lain-lain PAD yang Sah diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 18.852.481.491 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 18.226.934.634. Persentase realisasinya adalah sebesar 103,43%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi melebihi keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

## 2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer pada BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari tiga bentuk pendapatan yaitu : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan. Total anggaran pendapatan transfer yang ditargetkan untuk tahun 2017 sebesar Rp 910.189.355.120 dan total realisasi pendapatan transfer yang diperoleh sebesar Rp 881.817.590.895. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa persentase realisasinya sebesar 96,88%. Nilai persentase realisasi di atas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan pendapatan transfer yang terealisasi tidak mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan transfer yang telah dianggarkan.

Pada Transfer Pemerintah Pusat terdapat lima bentuk pendapatan yang diterima yaitu : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Realisasi terhadap anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp 839.472.606.186 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 910.189.355.120. Persentase realisasinya adalah sebesar 96,84%. Nilai persentase

realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi tidak mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

Pada Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, pendapatan yang diterima berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Realisasi terhadap anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp 42.344.984.709 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 43.343.285.120. Persentase realisasinyaa adalah sebesar 97,70%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi tidak mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

Pada Bantuan Keuangan, pendapatan yang diterima berupa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya. Realisasi terhadap anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp 0 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 0. Persentase realisasinyaa adalah sebesar 0%.

### 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari tiga bentuk pendapatan yaitu : Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Desa dari APBN dan Dana BOS. Realisasi terhadap anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp 115.769.337.017 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 123.454.942.600. Persentase realisasinyaa adalah sebesar 93,77%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan yang terealisasi tidak mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

Pada tahun 2019 selisih antara realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan sebesar Rp 17.957.822.199 dengan total realisasi pendapatan sebesar

Rp 1.082.495.846.011 dan total anggaran pendapatan sebesar Rp 1.100.453.668.210. Persentase realisasi terhadap anggaran pendapatan tersebut adalah 98,36%. Berdasarkan persentase di atas, diketahui bahwa pencapaian target realisasi pendapatan terhadap target anggaran pendapatan untuk tahun berjalan tidak mencapai target.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD pada BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari empat bentuk pendapatan yaitu : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Total anggaran PAD yang ditargetkan untuk tahun 2019 sebesar Rp 62.805.708.468 dan total realisasi PAD yang diperoleh sebesar Rp 70.122.562.532. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa presentase realisasi PAD yang diperoleh sebesar 111,65%. Nilai persentase realisasi di atas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan PAD yang terealisasi melebihi jumlah keseluruhan PAD yang telah dianggarkan.

Pada Pendapatan Pajak Daerah diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 26.316.419.960 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 26.085.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 100,89%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

Pada Pendapatan Retribusi Daerah diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 14.881.014.664 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 14.651.528.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 101,57%. Nilai persentase

realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi melebihi keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

Pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 2.732.595.137 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 3.200.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 85,39%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi tidak mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

Pada Lain-lain PAD yang Sah diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 26.192.532.770 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 18.869.180.468. Persentase realisasinya adalah sebesar 138,81%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi melebihi keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

## 2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer pada BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari tiga bentuk pendapatan yaitu : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan. Total anggaran pendapatan transfer yang ditargetkan untuk tahun 2019 sebesar Rp 904.005.032.742 dan total realisasi pendapatan transfer yang diperoleh sebesar Rp 874.067.517.898. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa persentase realisasinya sebesar 96,69%. Nilai persentase realisasi di atas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan pendapatan transfer yang terealisasi tidak mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan transfer yang telah dianggarkan.

Pada Transfer Pemerintah Pusat terdapat lima bentuk pendapatan yang diterima yaitu : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Realisasi terhadap anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp 817.231.451.960 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 840.336.100.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 97,25%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi tidak mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

Pada Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, pendapatan yang diterima berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Realisasi terhadap anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp 56.836.065.938 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 63.668.932.742. Persentase realisasinya adalah sebesar 89,27%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi tidak mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

Pada Bantuan Keuangan, pendapatan yang diterima berupa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya. Realisasi terhadap anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp 0 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 0. Persentase realisasinya adalah sebesar 0%.

### 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari tiga bentuk pendapatan yaitu : Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Desa dari APBN dan Dana BOS. Realisasi terhadap anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp 138.305.765.581 dengan jumlah anggaran yang

ditargetkan sebesar Rp 133.642.927.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 103,49%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan yang terealisasi melebihi keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

Pada tahun 2020 selisih antara realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan sebesar Rp 6.373.148.863 dengan total realisasi pendapatan sebesar Rp 968.329.052.089 dan total anggaran pendapatan sebesar Rp 974.702.200.952. Persentase realisasi terhadap anggaran pendapatan tersebut adalah 99,34%. Berdasarkan persentase di atas, diketahui bahwa pencapaian target realisasi pendapatan terhadap target anggaran pendapatan untuk tahun berjalan tidak mencapai target.

#### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD pada BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari empat bentuk pendapatan yaitu : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Total anggaran PAD yang ditargetkan untuk tahun 2020 sebesar Rp 55.920.283.256 dan total realisasi PAD yang diperoleh sebesar Rp 55.494.095.702. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa presentase realisasi PAD yang diperoleh sebesar 99,24%. Nilai persentase realisasi di atas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan PAD yang terealisasi tidak mencapai jumlah keseluruhan PAD yang telah dianggarkan.

Pada Pendapatan Pajak Daerah diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 22.137.549.427 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 22.835.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 96,95%. Nilai persentase

realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi tidak mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

Pada Pendapatan Retribusi Daerah diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 13.713.581.114 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 14.447.845.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 94,92%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi tidak mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

Pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 2.215.622.549 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 2.880.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 76,93%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi tidak mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

Pada Lain-lain PAD yang Sah diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp 17.427.342.612 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 15.757.438.256. Persentase realisasinya adalah sebesar 110,60%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi melebihi keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

## 2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer pada BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari tiga bentuk pendapatan yaitu : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan. Total anggaran pendapatan transfer yang ditargetkan untuk tahun 2020 sebesar Rp 782.326.833.696 dan total realisasi pendapatan transfer yang diperoleh sebesar Rp

770.468.802.360. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa persentase realisasinya sebesar 98,48%. Nilai persentase realisasi di atas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan pendapatan transfer yang terealisasi tidak mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan transfer yang telah dianggarkan.

Pada Transfer Pemerintah Pusat terdapat lima bentuk pendapatan yang diterima yaitu : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Realisasi terhadap anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp 719.527.169.929 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 731.596.543.715. Persentase realisasinya adalah sebesar 98,35%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi tidak mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

Pada Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, pendapatan yang diterima berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Realisasi terhadap anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp 13.415.171.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 13.415.171.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 100,00%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi mencapai keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

Pada Bantuan Keuangan, pendapatan yang diterima berupa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya. Realisasi terhadap anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp 37.526.461.431 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 37.315.118.981. Persentase realisasinya adalah sebesar 100,57%.

### 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari tiga bentuk pendapatan yaitu : Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Desa dari APBN dan Dana BOS. Realisasi terhadap anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp 142.366.154.027 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 136.455.084.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 104,33%. Nilai persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan yang terealisasi melebihi keseluruhan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran pendapatan tidak mencapai target menurut hasil wawancara terhadap salah satu narasumber pada BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara disebabkan masih rendahnya kesadaran stake holder maupun masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak daerah- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga feedbacknya yakni Dana Bagi Hasil dari Provinsi juga tidak terlalu besar.

## **2. Kinerja Keuangan Dilihat Dari Analisis Efektivitas PAD**

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD menunjukkan bahwa anggaran PAD Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 PAD dianggarkan sebesar Rp 52.690.086.354. Pada tahun 2018 anggaran PAD mengalami penurunan menjadi Rp 51.069.120.952. Pada tahun 2019 PAD dianggarkan sebesar Rp 62.805.708.468. Kemudian pada tahun 2020 anggaran PAD mengalami penurunan menjadi Rp 55.920.283.256. Pada tahun 2021 anggaran PAD mengalami kenaikan menjadi Rp 63.224.132.754.

Realisasi PAD Kabupaten Labuhanbatu Utara dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 PAD Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp 52.690.086.354. Mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu menjadi Rp 57.010.690.545. Pada tahun 2019 PAD Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami kenaikan menjadi Rp 70.122.562.532. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 55.494.095.702. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 58.863.185.741.

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD Keuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2017 sebesar 99%, tahun 2018 sebesar 111,63%, tahun 2019 sebesar 111,65%, tahun 2020 sebesar 99,23% dan tahun 2021 sebesar 93,10%. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk tahun 2018 dan 2019 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%. Untuk tahun 2017, 2020, dan 2021 berjalan Tidak Efektif karena efektivitasnya masih di bawah 100%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 102,92%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan kecuali pada tahun 2017, 2020, dan 2021.

Faktor-faktor yang menyebabkan PAD tidak efektif adalah masih adanya sebagian wajib pajak dan wajib retribusi yang kurang sadar dalam memenuhi kewajibannya sehingga potensi PAD tidak terdata secara optimal dan target PAD

tidak tercapai. Hal ini dibuktikan dengan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2017, realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun 2020 dan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun 2021 tidak mencapai anggaran yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2017 Retribusi Pelayanan Kesehatan realisasinya sebesar Rp 5.942.477.700 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp6.000.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 99,04%. Retribusi Pelayanan Pasar realisasinya sebesar Rp 424.509.500 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 608.874.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 69,72%. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor realisasinya sebesar Rp 49.795.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 59.400.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 83,83%. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran realisasinya sebesar Rp 7.810.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 9.850.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 79,29%. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta realisasinya sebesar Rp 40.690.400 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 180.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 22,60%. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasinya sebesar Rp 688.254.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 1.585.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 43,42%. Retribusi Rumah Potongan Hewan realisasinya sebesar Rp 38.271.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 50.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 76,54%. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasinya sebesar Rp3.000.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp7.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 42,86%. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp90.553.340

dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp250.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 36,22%. Retribusi Izin Gangguan sebesar Rp63.142.960 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp150.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 36,22%.

Pada Tahun 2020 Pajak Hotel realisasinya sebesar Rp25.750.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp45.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 57,22%. Pajak Hiburan realisasinya sebesar Rp6.600.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp20.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 33%. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan realisasinya sebesar Rp704.108.854 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp870.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 80,93%. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan realisasinya sebesar Rp5.466.410.099 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp6.000.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 91,10%. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) realisasinya sebesar Rp1.287.342.175 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp1.700.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 75,73%. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum realisasinya sebesar Rp42.000.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp70.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 60%. Retribusi Pelayanan Pasar realisasinya sebesar Rp96.443.500 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp548.100.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 17,6%. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor realisasinya sebesar Rp85.400.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp110.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 77,64%. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta sebesar Rp6.212.960 dengan jumlah

anggaran yang ditargetkan sebesar Rp162.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 3,83%. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasinya sebesar Rp178.375.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp1.211.500.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 14,72%. Retribusi Tempat Khusus Parkir realisasinya sebesar Rp8.000.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp10.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 80%. Retribusi Rumah Potong Hewan realisasinya sebesar Rp31.866.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp45.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 70,81%. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasinya sebesar Rp1.500.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp5.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 30%. Retribusi Penyebrangan Air realisasinya sebesar Rp20.620.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp50.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 41,24%.

Pada Tahun 2021 Pajak Hiburan realisasinya sebesar Rp6.100.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp10.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 61%. Pajak Sarang Burung Walet realisasinya sebesar Rp4.000.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp5.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 80%. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan realisasinya sebesar Rp697.049.272 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp1.170.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 59,58%. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan realisasinya sebesar Rp6.509.039.732 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp8.000.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 81,36%. Retribusi Pelayanan Kesehatan realisasinya sebesar Rp11.127.355.042 dengan jumlah

anggaran yang ditargetkan sebesar Rp15.255.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 72,94%. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan realisasinya sebesar Rp338.893.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp350.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 96,82%. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum realisasinya sebesar Rp52.650.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp75.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 70,2%. Retribusi Pelayanan Pasar realisasinya sebesar Rp82.064.500 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp360.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 22,79%. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta sebesar Rp11.732.040 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp12.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 97,77%. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasinya sebesar Rp204.950.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp301.500.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 67,98%. Retribusi Tempat Khusus Parkir realisasinya sebesar Rp1.000.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp10.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 10%. Retribusi Rumah Potong Hewan realisasinya sebesar Rp43.762.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp45.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 97,25%. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasinya sebesar Rp1.500.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp5.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 30%. Retribusi Penyebrangan di Air realisasinya sebesar Rp60.500.000 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp80.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 75,62%. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah realisasinya sebesar Rp159.873.800 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp160.000.000.

Persentase realisasinya adalah sebesar 99,92%. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan realisasinya sebesar Rp126.790.446 dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp150.000.000. Persentase realisasinya adalah sebesar 84,52%.

Faktor selanjutnya yang menyebabkan PAD tidak efektif pada tahun 2020 terjadi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menyebabkan pengurangan dana transfer ke daerah baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Sumatera Utara dan adanya ketentuan harus mengalokasikan belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 sehingga kegiatan yang telah direncanakan oleh SKPD tidak bisa dilaksanakan dan target yang telah ditetapkan sulit untuk dipenuhi. Tahun 2021 diterbitkan PMK17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2021 yang menyebabkan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang banyak mengubah struktur pendapatan dan belanja pada APBD.

Faktor lain yang menyebabkan PAD tidak efektif adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang ada sehingga potensi pendapatan belum dapat digali secara maksimal, terbatasnya kualitas SDM dalam mengelola pendapatan dan keuangan secara optimal dan beberapa jenis pajak dan retribusi yang sudah stagnan sehingga memerlukan payung hukum yang baru.

Menurut hasil wawancara terhadap salah satu narasumber pada BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara diketahui bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rasio efektivitas PAD adalah dengan peningkatan dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah, peningkatan sarana dan prasarana penunjang PAD, peningkatan kualitas pelayanan dengan menerapkan standar pelayanan minimal dan mengurangi perpindahan atau

mutasi aparatur pengelola PAD dengan mengalokasikan anggaran dalam peningkatan kinerja pengelola PAD.

### **3. Kinerja Keuangan Dilihat Dari Analisis Pertumbuhan**

Dilihat dari hasil analisis data pertumbuhan anggaran, pertumbuhannya mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp.1.050.277.014.266 dengan tingkat pertumbuhan 0, pada tahun 2018 realisasi anggaran sebesar Rp.1.033.343.832.203 dengan tingkat pertumbuhan sebesar -1.61. Pada tahun 2019 realisasi anggaran sebesar Rp.1.082.495.846.011 tingkat pertumbuhan naik menjadi 4,76. Pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar Rp.968.329.052.089 dengan tingkat pertumbuhan mengalami penurunan menjadi -10,55 dan pada tahun 2021 realisasi anggaran sebesar Rp.1.038.904.587.062 dengan tingkat pertumbuhan naik menjadi 7,29.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan kinerja pendapatan selama beberapa tahun anggaran (Mahmudi, 2019). pendapatan dapat dikatakan baik apabila dapat naik terus setiap tahun nya, jika mengalami penurunan maka penyebabnya harus ditemukan dan dicari solusinya (Halim & S.K, 2013).

Analisis Pertumbuhan Belanja menurut (Mahmudi, 2019) dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan belanja. Belanja tersebut harus dapat dikatakan rasional apabila pertanggungjawabannya telah dilakukan. (Mahmudi, 2019) menambahkan bahwa belanja cenderung akan selalu naik karena disesuaikan berdasarkan tingkat inflasi, perubahan kurs, pelayanan dan faktor ekonomi.

Menurut (Mahmudi, 2010) analisis pertumbuhan anggaran bermanfaat untuk mengetahui perkembangan anggaran dari tahun ke tahun. Pada umumnya anggaran

memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan anggaran biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan dan penyesuaian faktor makro ekonomi.

Dapat dilihat dari tahun 2019 yaitu 4,76 dan pada tahun 2021 yaitu 7,29 pertumbuhan keuangan daerah bernilai positif. Namun pada tahun 2018 dan 2020 pertumbuhan keuangan daerah nya bernilai negatif yaitu -1,61 dan -10,55. Selain disebabkan oleh realisasi anggaran mengalami penurunan secara signifikan, hal ini terjadi karena anggaran juga mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya.

Dari pembahasan diatas dapat dilihat dari hasil analisis data pertumbuhan anggaran Kabupaten Labuhanbatu Utara cenderung bernilai positif kecuali pada tahun 2018 dan 2020 bernilai negatif yang disebabkan menurunnya realisasi dari tahun sebelumnya.

Dalam mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah memiliki rencana atau strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah di masa mendatang yaitu meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan PAD, melakukan monitoring rutin dan evaluasi, melakukan pendataan ulang terhadap objek, besaran nilai dan wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah.

#### **4. Kinerja Keuangan Dilihat Dari Analisis Kemandirian Keuangan**

##### **Daerah**

Dilihat dari hasil analisis data berawal pada tahun 2017 rasio kemandirian sebesar 5,97% dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.52.690.086.354 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.881.817.590.895 kemudian pada tahun 2018 rasio

kemandirian naik menjadi 6,28% dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.57.010.690.545 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.906.591.141.658.

Pada tahun 2019 rasio kemandirian mengalami kenaikan menjadi 6,31% dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.70.122.562.532 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.874.067.517.898 serta pada tahun 2020 rasio kemandirian mengalami kenaikan menjadi 8,02% dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.55.494.095.702 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.770.468.802.360 dan 2021 dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.58.863.185.741 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.931.448.207.672 serta rasio kemandirian pun mengalami penurunan menjadi 7,20%. Pola kemandirian keuangan pada data diatas tergolong instruktif karena tergolong dalam interval 0%-25% yaitu instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah atau daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara belum mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak mampu mengelola pendapatan dan belanja sekaligus dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sosial dengan baik, dengan kata lain kemandirian keuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak baik.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kinerja keuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2017-2021 dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah tidak sesuai dengan tujuan yang tercantum di dalam

Undang-Undang. Menurut (Halim, 2008) “Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.”

Analisis kemandirian digunakan untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah dalam mendanai daerahnya melalui PAD (Kawatu, 2019). Perhitungan rasio kemandirian menurut (Kawatu, 2019) dilakukan dengan membandingkan PAD dengan total antara transfer pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pinjaman dari Pemerintah Daerah (Pemda) lainnya. PAD yang semakin besar dibandingkan total transfer akan mencerminkan kemandirian daerah tersebut yang artinya daerah tersebut mampu membiayai otonomi daerahnya.

Menurut hasil wawancara terhadap salah satu narasumber pada BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara diketahui bahwa semakin besar PAD yang dihasilkan dan maksimal pengelolaannya maka semakin mandiri keuangan daerah tersebut.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kinerja keuangan dilihat dari Analisis Efektivitas PAD, Analisis Pertumbuhan dan Analisis Kemandirian Keuangan Daerah.

1. Realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2017, 2019 dan 2020 tidak mencapai anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran stake holder maupun masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga feedbacknya yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi juga tidak terlalu besar.
2. Kinerja Keuangan dilihat dari Analisis Efektivitas PAD memiliki kinerja yang menurun, Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah tidak mencapai dari yang dianggarkan sebelumnya sehingga Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara belum mampu memanfaatkan anggarannya dengan baik.
3. Kinerja Keuangan dilihat dari Analisis Pertumbuhan mengalami fluktuasi dan dimana pertumbuhannya bernilai negatif dan positif yang artinya daerah belum mampu mempertahankan pertumbuhan daerahnya tetapi telah mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

4. Kinerja Keuangan dilihat dari Analisis Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan mengalami pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

## **5.2 Saran**

1. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer terutama Dana Bagi Hasil dengan cara meningkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah melalui sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menyediakan sarana dan prasaran yang memadai.
2. Untuk menciptakan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Labuhanbatu Utara terutama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan melalui Diklat, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Studi Banding atau pengalaman dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukri, & Asmar, J. A. (2006). *Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah*. Simposium Akuntansi Nasional.
- Alfi, M. F. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, Vol. 2 No. 3.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi 3*. Erlangga.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Erlangga.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Halim, A., & S.K. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Hanum, Z. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Berdagai. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis UMSU Jilid 11*.
- Juliandi, A., & dkk. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*. UMSU Press.
- Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. UPP STIM YKPN.
- Junita, & dkk. (2016). *Penganggaran Perusahaan*. Cita Pustaka Media.
- Kawatu. (2019). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. 7 No. 3.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3 Cetakan 2*. UPP STIM YKPN.

- Mahsun. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-Yogyakarta.
- Mahsun. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.
- Mahsun, M. (2006b). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Mariani, D. (2006). *Anggaran sebagai Alat Pengendalian*.
- Mulyadi. (2001). *Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat dan Rekayasa Edisi Ketiga*. Salemba Empat.
- Mulyadi. (2007). *Anggaran Perusahaan*. BPFE.
- Munawir. (2002). *Analisis Informasi Keuangan Edisi Pertama*. Liberty Yogya.
- Munawir, S. (2004). *Analisis Laporan Keuangan*. Liberty.
- Nafarin, M. (2012). *Penganggaran Perusahaan, Edisi Revisi*. Salemba Empat.
- Niaman, M. (2017). *Fungsi dan Manfaat Anggaran (Lengkap)*. <https://www.akuntansilengkap.com>.
- Nordiawan. (2016). Pengembangan Indikator Keberhasilan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol. 1 No. 1*.
- Peraturan Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007. (2011). *Tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Fokusmedia.
- Prasetya, G. E. (2005). *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. ANDI.
- Radita, A. H. (2017). *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012-2016 Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi*. Skripsi yang dipublikasikan.
- Rahayu, S., & Rachman, A. A. (2013). *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Graha Ilmu.
- Rahmayati, I. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat.
- Rudianto. (2013). *Akuntansi Manajemen*. Graha Ilmu.
- Sari, E. N., & dkk. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Perdana Publishing.

- Sari, M. (2021). *Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Good Corporate Governance*. UMSU Press.
- Sawir, A. (2005). *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sinambela, E., & F.S. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Srimindarti, C. (2006). *Balanced Scorecard sebagai Alternatif untuk mengukur kinerja*. STIE Stikubank.
- Sujarweni, W. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Pustaka Baru Press.
- Suryani, F. (2018). *Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Media Intan Semesta Jakarta*. XVI(1), 77–83.
- Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. (2004). UndangUndang No. 133 Tahun 2004.
- UMSU, F. (2021). *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. UMSU.
- Welsch, & dkk. (2012). *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba. Buku 1*. Salemba Empat.
- Widyaningsih, K. (2006). *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)*. Skripsi yang dipublikasikan.
- Wild, & Halsey. (2005). *Analisis Laporan Keuangan*. Salemba Empat.

## **DRAFT WAWANCARA**

**Nama** : **Munawir Alamsyah Naipospos, S.Kom**  
**Jenis Kelamin** : **Laki-laki**  
**Umur** : **40 tahun**  
**Jabatan** : **Kepala Bidang Akuntansi BKAD Labuhanbatu Utara**

### **Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2017 - 2021**

#### **1. Realisasi PAD**

Apa saja jenis-jenis PAD yang berhasil direalisasikan, realisasi PAD yang paling besar dan realisasi mana yang paling rendah serta berapa persentase kontribusinya terhadap target yang ditetapkan?

**Jawaban :**

PAD yang berhasil direalisasikan :

- Pajak Daerah realisasi 99.49%
- Retribusi Daerah realisasi 72.49%
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan realisasi 114.53%
- Lain-lain PAD yang Sah realisasi 100.23%

#### **2. Anggaran PAD**

Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan pencapaian anggaran PAD sesuai dengan target yang ditetapkan?

**Jawaban :**

- Memperbaiki sistem dan prosedur terhadap kemudahan pelayanan.

- Mendorong efektivitas pengawasan yang lebih ketat.
- Peningkatan kualitas SDM pengelola pendapatan.

### 3. Realisasi Belanja Daerah

Bagaimana evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah?

**Jawaban :**

Penggunaan APBD dalam membangun daerah sudah mempedomani Permendagri No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Ketentuan ini kemudian menjadi pedoman dalam menselaraskan Visi dan Misi Kepala Daerah dalam membangun daerahnya, sehingga terbitlah anggaran yang tepat saji, efektif dan efisien.

### 4. Realisasi Pendapatan Daerah

Apakah ada pertumbuhan atau penurunan dalam realisasi pendapatan daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan faktor apa yang menyebabkannya?

**Jawaban :**

Ada penurunan dalam realisasi pendapatan secara keseluruhan akan tetapi tidak terlalu signifikan, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran stake holder maupun masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak daerah- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga feedbacknya yakni Dana Bagi Hasil dari Provinsi juga tidak terlalu besar.

## **Penilaian Kinerja Keuangan**

### 1. Rasio Efektivitas PAD

Apa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan rasio efektivitas PAD?

**Jawaban :**

- Peningkatan dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah
- Peningkatan sarana dan prasarana penunjang PAD
- Peningkatan kualitas pelayanan dengan menerapkan standar pelayanan minimal
- Mengurangi perpindahan/mutasi aparatur pengelola PAD dengan mengalokasikan anggaran dalam peningkatan kinerja pengelola PAD

### 2. Rasio Pertumbuhan

Bagaimana rencana atau strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah di masa mendatang?

**Jawaban :**

- Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan PAD.
- Melakukan monitoring rutin dan evaluasi.
- Melakukan pendataan ulang terhadap objek, besaran nilai dan wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah.

### 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Apa indikator atau faktor yang digunakan untuk mengevaluasi kemandirian keuangan daerah?

**Jawaban :**

Rasio besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap dana Perimbangan Daerah (DAU-DAK-DID dll). Semakin besar PAD yang dihasilkan dan maksimal pengelolaannya maka semakin mandiri keuangan daerah tersebut.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 2796/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/13/12/2022

Kepada Yth  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 13/12/2022

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ikram Ihza Hawari  
NPM : 1905170375  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Bagaimana tingkat ekonomi, efisensi dan efektivitas laporan realisasi anggaran dalam menilai kinerja keuangan.  
2. Apakah sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.  
3. Apakah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rencana Judul : 1. ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN  
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
3. PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Objek/Lokasi Penelitian : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Ikram Ihza Hawari)

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 2796/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/13/12/2022

Nama Mahasiswa : Ikram Ihza Hawari  
NPM : 1905170375  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Tanggal Pengajuan Judul : 13/12/2022  
Nama Dosen pembimbing\*) : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA (23 Desember 2022)

Judul Disetujui\*\*)

"Analisis Laporan Realisasi anggaran  
untuk menilai kinerja keuangan  
pada ~~tahun~~ ~~2020~~ Kabupaten  
Labuhan Batu Utara"

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si.)

Medan, Januari 2023

Dosen Pembimbing

(.....)

Keterangan:

\*) Disetujui oleh Pimpinan Program Studi

\*\*\*) Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id>    [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)    [f umsumedan](#)    [i umsumedan](#)    [u umsumedan](#)    [o umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 239/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2023**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 14 Januari 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ikram Ihza Hawari  
N P M : 1905170375P  
Semester : X (Eks)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kabupaten Labuhanbatu Utara

Dosen Pembimbing : **Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 31 Januari 2024**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 09 Rajab 1444 H  
31 Januari 2023 M

Dekan  
  
**Dr. Eka Nurmala Sari, SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502



**Tembusan :**

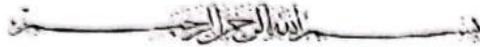
1. Bertanggung



## PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 9 Rajab 1444 H  
.. 31 Januari .. 2023 M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I K R A M I H Z A H A W A R I

NPM : 1 9 0 5 1 7 0 3 7 5 P

Tempat. Tgl. Lahir : K I S A R A N 2 8 S E P T E M B E R  
1 9 9 7

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : D U S U N I V A P A L I A K A B  
L A B U H A N B A T U U T A R A

Tempat Penelitian : B A D A N K E S A T U A N B A N G S  
A D A N P O L I T I K L A B U H A  
N B A T U U T A R A

Alamat Penelitian : J A L A N K O P T U M A H M U N L  
U B I S N O . 0 7 - 0 8 K O M P L E  
K P A S A R L A M A

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si.)

Wassalam  
Pemohon

(IKRAM...IHZA...HAWARI)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Esu pernah, juncacu apir disididkan  
nau. dia. kagga-ha

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 237/II.3-AU/UMSU-05/F/2023

Medan, 09 Rajab 1444 H

Lampiran :-

31 Januari 2023 M

Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pimpinan

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Labuhanbatu Utara**

Jln. Koptu Mahmud Lubis No.07-08 Komplek Pasar Lama Aek Kanopan

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ikram Ihza Hawari

Npm : 1905170375P

Program Studi : Akuntansi

Semester : X (Eks)

Judul Skripsi : Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kabupaten Labuhanbatu Utara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**

1. Pertinggal



Dekan

**Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si**

NIDN : 0109086502





PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
JLN. KOPTU MAHMUN LUBIS NO. 7-8 KOMPLEKS PASAR LAMA TELP. FAX. (0624) 693208  
ABK KANOPAN

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor :072/009 /KESBANGPOL/2023

1. Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- b. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lauhanbatu Utara.
2. Menimbang : Surat Majelis Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- a. Nama : **IKRAM IHZA HAWARI**
- b. Alamat : Dusun IV Palia, Gunung Melayu, Kec. Kualuh Selatan
- c. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- d. KTP : 1223012809970004
- e. Lokasi : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- f. Waktu : 7 Februari 2023 s/d 7 Maret 2023
- g. Penanggungjawab : Dr. H. Januari. SE, MM, M,Si.
- h. Judul Penelitian : Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kabupaten Labuhanbatu Utara

3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Penelitian dimaksud dengan catatan, yang bersangkutan diwajibkan mematuhi Ketentuan/Peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat dan Peneliti diwajibkan melaporkan hasilnya ke Badan Kesbangpol Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir 3 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka rekomendasi ini tidak berlaku.
5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan Ijin Penelitian.

Aek Kanopan, 7 Februari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



SUKAMTO, SE, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19650805 198602 1 003

Tembusan:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu Utara (sebagai laporan).
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Pertinggal.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengasah surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 2413/II.3-AU/UMSU-05/F/2023  
Lamp. : -  
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 14 Shafar 1445 H  
31 Agustus 2023 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara**  
Jln. Koptu Mahmum Lubis No.07-08 Komplek Pasar Lama Aek Kanopan  
Di-  
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ikram Ihza Hawari  
N P M : 1905170375P  
Semester : x (Eks)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kabupaten Labuhanbatu Utara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
1. Pertinggal



Dekan

**Dr. H. Jahuri, SE., MM., M.Si., CMA**  
NIDN : 0109086502



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jln. Jenderal Sudirman, Komplek Kantor Bupati Labuhanbatu Utara

Email : bkad@labura.go.id

**AEK KANOPAN**

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 400/ 1106 /Sekr/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si  
b. Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Utara

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : IKRAM IHZA HAWARI  
b. NIM : 1905170375P  
c. Program Studi : Akuntansi  
d. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara (UMSU)

Adalah benar telah melakukan Penelitian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 072/004/KESBANGPOL/2023 tanggal 7 Februari 2023 selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan 7 Maret 2023 dengan judul penelitian "ANALIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA".

Demikian Surat Keerangan ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aek Kanopan, 19 September 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196907121995031003



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa  
N P M  
Dosen Pembimbing  
Program Studi  
Konsentrasi  
Judul Penelitian

: IKRAM IHZA HAWARI  
: 1905170375P  
: Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA  
: AKUNTANSI  
: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
: ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI  
KINERJA KEUANGAN PADA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	perbaiki UBM. sistematika penulisan Spasi perbaiki data luas mendelay, identifikasi masi masalah perhd.	16/6 23	3/
Bab 2	Teser di buang yg tidak perlu, kerangka konsep perbaiki, seri ditambah	16/6 23	3/
Bab 3	Jadual perbaiki defenisi sumber sumber. perbaiki lagi, buat tabel wawan car.	16/6 23	3/
Daftar Pustaka	Intan dosen sek UMSU, mendelay	16/6 23	3/
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	—		
Persetujuan Seminar Proposal	—		

Medan, 13 Juli 2023  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA)

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : IKRAM IHZA HAWARI  
N P M : 1905170375P  
Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Penelitian : ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	LBM masalah penulisan sertakan, masalah gya rest.	20/6/23	3/1
Bab 2	Teri ditambak lebih di pechukung buat umum, pechukung. Unsu	20/6/23	3/1
Bab 3	Pecehukung depur opul variabel	20/6/23	3/1
Daftar Pustaka	Stoer. Lese umsu, gunale mendek.	20/6/23	3/1
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	pechukung 158mu, : Buat daftar wawancara	20/6/23	3/1
Persetujuan Seminar Proposal			

Medan, 13 Juli 2023  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA)

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : IKRAM IHZA HAWARI  
N P M : 1905170375P  
Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Penelitian : ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	judul, rumus penulisan tabel dan Bab 1. mulai	23/6/23	3/1
Bab 2	penomoran di dalam	23/6/23	3/1
Bab 3	bant daftar wawancara	23/6/23	3/1
Daftar Pustaka	judul referensi dan	23/6/23	3/1
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Bant daftar wawancara. Bant ppt.	23/6/23	3/1
Persetujuan Seminar Proposal			

Medan, 13 Juli 2023

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA)

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : IKRAM IHZA HAWARI  
N P M : 1905170375P  
Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Penelitian : ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	kerangka skripsi ditambah teori	7/7 23	3/1
Bab 3	—		
Daftar Pustaka	—		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	—		
Persetujuan Seminar Proposal	ace proposal lanjut seminar	7/7 23	3/1-

Medan, 13 Juli 2023

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmal Sari, SE., M.Si., Ak., CA)

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. DATA PRIBADI

Nama : Ikram Ihza Hawari  
Tempat dan Tanggal Lahir : Kisaran, 28 September 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak ke : 1 dari 3 bersaudara  
Alamat : Dusun IV A Palia, Desa Gunung Melayu, Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara  
No. Telephone : 085275532100  
Email : ikramihza99@gmail.com

### II. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Syawaluddin, S.E.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Nama Ibu : Siti Mutmainnah, S.Pd  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Dusun IV A Palia, Desa Gunung Melayu, Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara  
No. Telephone : 085275138131  
Email : -

### III. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri No. 112279 Aek Kanopan  
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 2 Kualuh Selatan  
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMA Negeri 1 Aek Natas  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) (2019 – 2024).

Medan, 2024



(Ikram Ihza Hawari)



**BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Rabu, 16 Agustus 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Ikrum Ihza Hawari*  
NPM. : *1905170375P*  
Tempat / Tgl.Lahir : *Kisaran, 28 September 1997*  
Alamat Rumah : *Dusun IV A Palia, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.*  
Judul Proposal : *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kabupaten Labuhanbatu Utara*

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	<i>judul di sempurnakan.</i>
Bab I	<i>latar belakang masalah rumusan masalah tujuan penelitian</i>
Bab II	
Bab III	<i>kisi-kisi wawancara.</i>
Lainnya	<i>sistematika penulisan buku pedoman</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, *16 Agustus 2023*

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Pemanding

Henny Zurika Lubis, SE., M.Si



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 16 Agustus 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Ikram Ihza Hawari  
NPM : 1905170375P  
Tempat / Tgl.Lahir : Kisaran, 28 September 1997  
Alamat Rumah : Dusun IV A Palia, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan,  
Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.  
Judul Proposal : Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada  
Kabupaten Labuhanbatu Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan  
pembimbing : *Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA*

Medan, 16 Agustus 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Pemanding

Henny Zurika Lubis, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si  
NIDN : 0105087601